



**BUPATI ENDE**  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE  
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN ENDE  
TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan instruksi menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024, kepala Perangkat Daerah Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2025 – 2026 yang menetapkan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Ende Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2026, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2026;
  - c. Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2026 akan digunakan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagai pedoman untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende Tahun 2025- 2026;

Mengingat...

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2009 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1);
  6. Peraturan Bupati Ende Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 1);

7. Instruksi...

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkup daerah dalam jangka waktu tertentu.
3. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 dengan pelaksanaan legih lanjut dituangkan daam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.Tahun 2025-2026.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah Dokumen Perencanaan Strategi Perangkat Daerah untuk Satu (1) tahun.
7. Daerah adalah Kabupaten Ende.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
9. Bupati adalah Bupati Ende.
10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Badan...

11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende.

## BAB II

### KETENTUAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2025 - 2026

#### Pasal 2

- (1) Renstra Tahun 2025 - 2026 sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana Tahun 2025 - 2026.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja.
- (3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan :
  - a. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026;
  - b. Hasil evaluasi capaian indikator Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende Tahun 2019 - 2024;
  - c. Isu-isu strategis yang berkembang;
  - d. Kebijakan nasional;
  - e. Regulasi yang berlaku.
- (4) Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra Perangkat Daerah memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025 - 2026 dan Norma Standar Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.
- (5) Penentuan program dalam Renstra Perangkat Daerah memperhatikan :
  - a. Penyelarasan program prioritas nasional;
  - b. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil Renstra melalui evaluasi capaian Renja sampai dengan Tahun 2023;
  - c. Evaluasi kontribusi keluaran output dari seluruh kegiatan/ sub kegiatan sampai dengan Tahun 2023 dalam pencapaian hasil;
  - d. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dari tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
  - e. Kebijakan nasional;
  - f. Regulasi yang berlaku dan
  - g. Saran dan/ atau masukan dari pemangku kepentingan pembangunan daerah.

Pasal 3...

### Pasal 3

- (1) Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026 digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

### Pasal 4

- (1) Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2026 memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta program kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende Tahun 2025- 2026.
- (2) Sistematika Renstra Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Bab I           Pendahuluan
  - b. Bab II          Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
  - c. Bab III        Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
  - d. Bab IV        Tujuan dan Sasaran
  - e. Bab V          Strategi dan Arah Kebijakan
  - f. Bab VI        Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan
  - g. Bab VII       Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
  - h. Bab VIII      Penutup
- (3) Isi dan uraian Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

- (1) Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026 dapat dilakukan perubahan apabila:
  - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
  - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
  - c. Terjadi perubahan yang mendasar; dan
  - d. Perubahan...

- d. Perubahan Renstra Tahun 2025 – 2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Perubahan Renstra berpedoman pada perubahan RPD

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende  
pada tanggal 25 Juni 2024

  
Pj. BUPATI ENDE,  
AGUSTINUS G. NGASU

Diundangkan di Ende  
pada tanggal 26 Juni 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE

  
EFREM DIAKON AINA

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 25

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE  
NOMOR 25 TAHUN 2024  
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA KABUPATEN ENDE TAHUN 2025 – 2026

ISI DAN URAIAN RENSTRA

A. DAFTAR ISI

	Halaman	
Daftar Isi	i	
Daftar Tabel	ii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Dasar Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	4
	1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	6
	2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	6
	2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	11
	2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
	2.4. Kelompok Sasaran Layanan	24
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	26
	3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.	26
	3.2. Isu Strategis	26
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	29
	4.1. Tujuan dan Sasaran	29
	4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah	29
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	35
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	37
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	58
BAB VIII	PENUTUP	59

## B. DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Klasifikasi ASN Dinas PPKB Kab. Ende Berdasarkan Golongan Tahun 2023	11
Tabel 2.2 Klasifikasi Pegawai Dinas PPKB Kab. Ende Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023	11
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende Tahun 2019 – 2023	14
Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana DPPKB Kab. Ende	8
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende Tahun 2017-2021	11
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende	23
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	29
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	35
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026	38
Tabel 7.1 Indikator Kinerja DPPKB Kabupaten Ende Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	58

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap Daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pada tataran perangkat daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024 mengamanatkan bahwa Bupati/ Walikota yang daerahnya memiliki periode RPJMD berakhir Tahun 2024, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025 – 2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2025 – 2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra PD Kabupaten/ Kota Tahun 2025 – 2026.

Menindaklanjuti amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas PPKB) Kabupaten Ende sebagai salah satu perangkat daerah yang ada di Kabupaten Ende wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2026 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dalam bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026.

Renstra Dinas PPKB Kabupaten Ende tersebut menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang

belum tertangani pada periode sebelumnya. Renstra Dinas PPKB Kabupaten Ende juga menetapkan sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat dikur. Dengan demikian Renstra DPPKB Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja serta menjadi pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas PPKB Kabupaten Ende.

Proses penyusunan Renstra Dinas PPKB Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra.

## **1.2. Dasar Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4483);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

8. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080),
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817),
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende 2011 – 2031;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11);
21. Peraturan Bupati Ende Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende;
22. Peraturan Bupati Ende Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 1)

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan daerah (RPD) Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende.

Tujuan penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende adalah :

- a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana selama kurun waktu tahun 2025-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Ende dalam mendukung tujuan Bupati Ende.

- b. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana kurun waktu tahun 2025-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende.
- c. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025-2026.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

*BAB I PENDAHULUAN*, memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

*BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH*, memuat informasi tentang tugas, fungsi struktur perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah dan kelompok sasaran layanan.

*BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH*, memuat tentang permasalahan pelayanan perangkat daerah dan isu strategis.

*BAB IV TUJUAN DAN SASARAN*, memuat tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah serta cascading kinerja perangkat daerah.

*BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN*, memuat tentang strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2026.

*BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN*, menguraikan program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagunya.

*BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN*, memuat tentang target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2026.

*BAB VIII PENUTUP*

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende ditetapkan melalui Peraturan Bupati Ende Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende.

##### **2.1.1. Tugas dan Fungsi**

Tugas Dinas PPKB Kabupaten Ende adalah membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga daerah kabupaten.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas PPKB Kabupaten Ende menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
2. Pelaksanaan norma standar prosedur dan kriteria di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
3. Pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk.
4. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.
5. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana.
6. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana dan petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana.
7. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi.
8. Pelaksanaan pelayanan keluarga berencana
9. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan pembinaan kesetaraan keluarga berencana, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
10. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Ende Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende sebagai berikut :

### *Sekretariat*

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas;
- b. Penyusunan rencana program dan anggaran;
- c. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi;
- d. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kerumahtangaan, kepegawaian dan organisasi serta hubungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sekretariat membawahi dua sub bagian :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga dan pengelolaan barang milik daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan persuratan;
- b. Pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- c. Pelaksanaan urusan kerumahtangaan, keamanan dan ketertiban kantor;
- d. Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan barang milik daerah;
- e. Pelaksanaan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
- f. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana; dan
- g. Pengelolaan kehumasan.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi anggaran dan pembukuan. Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan;
- b. Penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntansi dan pembukuan keuangan;
- c. Pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;

- d. Penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan pegawai;
- e. Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan; dan
- f. Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

#### *Bidang Pengendalian Penduduk*

Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk. Dalam menjalankan tugasnya bidang pengendalian penduduk menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- c. Pelaksanaan kebijakan daerah bidang sistem informasi keluarga;
- d. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan ppengendalian penduduk daerah;
- f. Pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang pengendalian penduduk;
- g. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang pengendalian penduduk; dan
- h. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

#### *Bidang Keluarga Berencana*

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis bidang keluarga berencana daerah kabupaten. Dalam menjalankan tugasnya, bidang keluarga berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah bidang keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obatkontrasepsi daerah;
- e. Pelaksanaan pelayanan keluarga berencana daerah;
- f. Pelaksanaan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana daerah;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang keluarga berencana;
- h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang keluarga berencana; dan
- i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

#### *Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*

Bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Dalam melaksanakan tugasnya bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang bina keluarga balita;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang pembinaan ketahanan remaja;
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang bina keluarga lansia dan rentan;
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- g. Pemantauan dan evaluasi bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga; dan
- i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

#### *Bidang Penyuluhan dan Penggerakan*

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang penyuluhan dan penggerakan. Dalam menjalankan tugasnya bidang penyuluhan dan penggerakan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang penyuluhan dan penggerakan;
- b. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana/ petugas lapangan keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan.

#### *Kelompok Jabatan Fungsional*

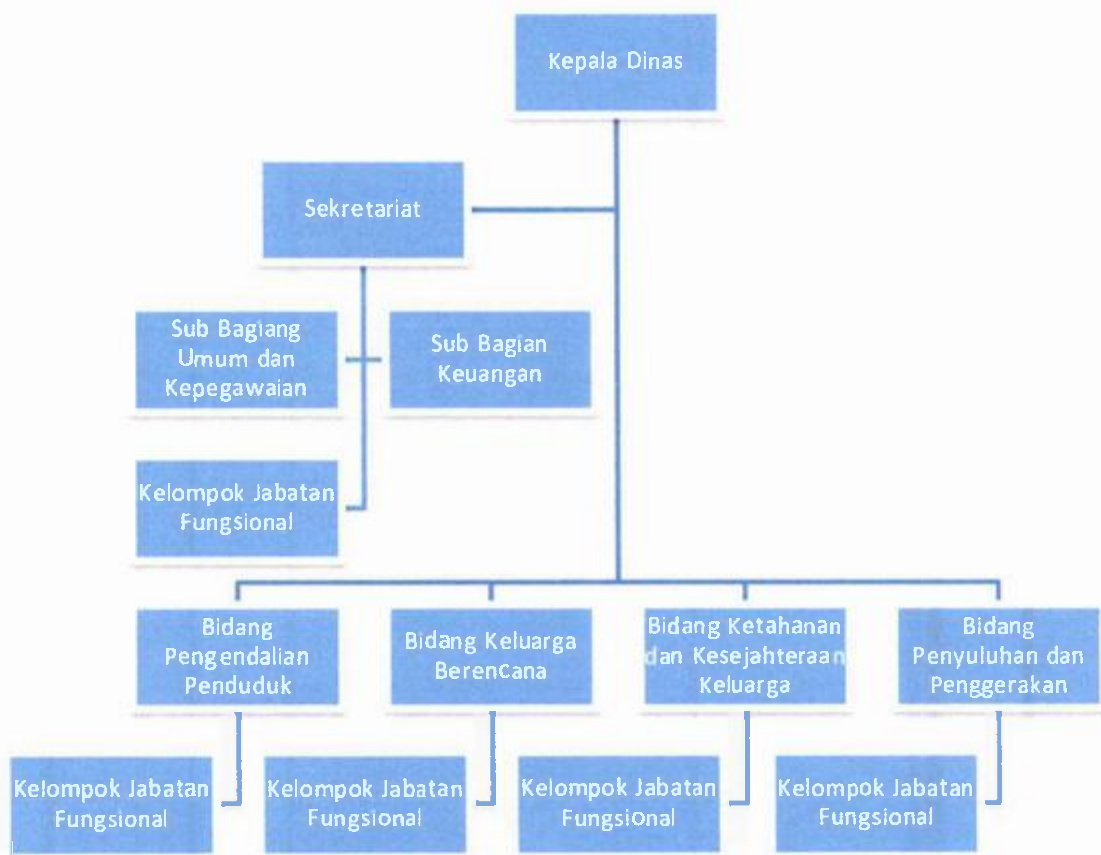
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 2.1.2. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, yang membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pengendalian Penduduk.
4. Bidang Keluarga Berencana.
5. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
6. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1.  
Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende



## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Pegawai di lingkungan Dinas PPKB Kabupaten Ende kondisi sampai dengan bulan Desember 2023 sebanyak 29 orang ASN (8 laki-laki dan 21 perempuan). Dilihat dari tingkat pendidikannya, jumlah pegawai dengan pendidikan S2 sebanyak 3 orang, pendidikan S1 sebanyak 20 orang, pendidikan D3 sebanyak 2 orang, pendidikan SLTA sebanyak 4 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1 Klasifikasi ASN Dinas PPKB Kab. Ende Berdasarkan Golongan Tahun 2023

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	IV	1	6	7
2.	III	5	13	17
3.	II	2	2	4
Total		8	21	29

Sumber data kepegawaian Desember 2023

Tabel 2.2 Klasifikasi Pegawai Dinas PPKB Kab. Ende Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Strata 2	1	2	3
2.	Strata 1	5	15	20
3.	Diploma 3	1	1	2
4.	Sekolah Menengah Atas	1	3	4
Total		8	21	29

Sumber data kepegawaian Desember 2023

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan Dinas PPKB Kabupaten Ende adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Dinas PPKB Kab. Ende

No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. III	512 M2	Baik -
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1500 M2	Baik -
3	Station Wagon	3	Baik (1) Rusak Berat (2)
4	Micro Bus	2	Baik -
5	Pick Up	1	Baik -
6	Sepeda Motor	101	Baik (45) Rusak Berat (56)
7	Lemari Penyimpan	4	Baik -
8	Alat Pembuat Pelet/Makanan Ternak	14	Baik -
9	Mesin Stensil Manual Folio	1	- Rusak Berat
10	Lemari Besi	1	Baik -

No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan	
11	Lemari Kayu	18	Baik	-
12	Rak Besi	1	Baik	-
13	Rak Kayu	19	Baik	-
14	Filing Cabinet Besi	5	Baik	-
15	Brandkas	1	-	Rusak Berat
16	Papan Visual/Papan Nama	4	Baik	-
17	White Board	8	Baik	-
18	Overhead Projector	1	-	Rusak Berat
19	Alat Sidik Jari	1	Baik	-
20	Papan Nama Instansi	9	Baik	-
21	Meja 1/2 Biro	50	Baik (49)	Rusak Berat (1)
22	Kursi Putar	3	Baik	-
23	Kursi Biasa	130	Baik	-
24	Meja Komputer	2	-	Rusak Berat
25	Sofa	1	Baik	-
26	Meubler Lainnya	15	Baik	-
27	Jam Mekanis	1	-	Rusak Berat
28	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2	Baik	Rusak Berat
29	Mesin Pemetong Rumput	1	Baik	-
30	AC Split	5	Baik	-
31	Kipas Angin	18	Baik	-
32	Exhaust Fan	12	Baik	-
33	Treng Air/Tandon Air	1	Baik	-
34	Loud Speaker	1	Baik	-
35	Wireless	24	Baik (21)	Rusak Berat (3)
36	Megaphone	3	-	Rusak Berat
37	Microphone	2	-	Rusak Berat
38	Microphone Floor Stand	1	-	Rusak Berat
39	Unit Power Supply	2	Baik	-
40	Camera Video	1	-	Rusak Berat
41	Timbangan orang	1	-	Rusak Berat
42	Lambang Garuda Pancasila	1	Baik	-
43	Gambar Presiden/Wakil Presiden	2	Baik	-
44	Tangga Aluminium	2	Baik	-
45	Alat Pemadam/Portable	1	Baik	-
46	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik	-
47	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	7	Baik	-
48	Kursi kerja Pejabat Eselon III	3	Baik	-
49	Kursi Kerja Pegawai non Struktural	1	Baik	-
50	Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	2	Baik	-
51	Buffet Kayu	1	Baik	-
52	Compact Disc Player	2	Baik	-
53	Slide Projector	2	-	Rusak Berat
54	Layar Film/Projector	15	Baik (14)	Rusak Berat (1)
55	Facsimili	1	-	Rusak Berat
56	Alat komunikasi telephone lainnya (dst)	1	Baik	-
57	Alat kedokteran umum lainnya	1	Baik	-

No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan	
58	Alat kedokteran keluarga berencana lainnya (dst)	246	Baik	-
59	Kursi Kayu	60	Baik (56)	Rusak berat (4)
60	Meja Rapat	13	Baik (10)	Rusak berat (3)
61	Alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan lainnya (dst)	68	Baik	-
62	Alat kesehatan umum lainnya	4	Baik	-
63	Distilling Apparatus	3	Baik	-
64	Alat laboratorium lain lainnya (dst)	2	Baik	-
65	P.C Unit	43	Baik (37)	Rusak berat (6)
66	Laptop	4	Baik (3)	Rusak berat (1)
67	Keyboard	2	-	Rusak Berat (2)
68	Printer	50	Baik (39)	Rusak berat (11)
69	Scanner	2	Baik	-
70	Peralatan Personal Komputer lainnya	12	Baik (4)	Rusak berat (8)
71	Modem	35	Baik (34)	Rusak berat (1)
72	Bangunan Gedung Kantor Permanen	22	Baik	-
73	Bangunan Gedung kantor lain-lain	1	Baik	-
74	Bangunan Gudang Tertutup Lainnya	1	Baik	-
75	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	1	Baik	-
76	Jalan Khusus Kompleks	1	Baik	-
77	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	5	Baik	-

Sumber data : Buku Inventaris Gabungan Desember 2021

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas PPKB Kabupaten Ende dapat diukur dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Ende 2019 – 2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas PPKB Kabupaten Ende tahun 2019 – 2024. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran, diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut (tabel.2.4) dibawah ini :

Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende  
Tahun 2019 - 2023

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian tahun Ke				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	-	-	-	2,54	2,5	2,46	2,43	2,40	1,49	2,7	2,3	2,59	2,82	1,70	0,93	1,07	1,07	1,07
2.	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	-	-	-	61,49 %	64,10 %	66,67 %	69,21 %	71,71 %	53,25 %	60,72 %	52,85 %	37,16 %	39,21 %	0,87	0,95	0,79	0,54	0,48
3.	Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	-	-	-	39,12 %	33,34 %	24,92 %	21,71 %	16,71 %	33,98 %	25,50 %	30,69 %	55,12 %	38,09 %	1,15	1,31	0,82	0,38	0,43
4.	Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur (ASFER 15-19 Thn)	-	-	-	-	28 per 1000 kelahiran	26 per 1000 kelahiran	24 per 1000 kelahiran	22 per 1000 kelahiran	-	33 per 1000 kelahiran	18 per 1000 kelahiran	10 per 1000 kelahiran	27 per 1000 kelahiran	-	0,84	1,4	0,42	0,81
5.	Meningkatnya implementasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan pengendalian penduduk	-	-	-	-	-	-	84,5 %	85,5 %	-	-	-	50%	56,25 %	-	-	-	0,59	0,66
6.	Meningkatnya penggunaan metode	-	-	-	-	43,93 %	47,50 %	44,11 %	45,31 %	-	41,75 %	46,64 %	45,37 %	45,31 %	-	0,95	0,98	1,03	1

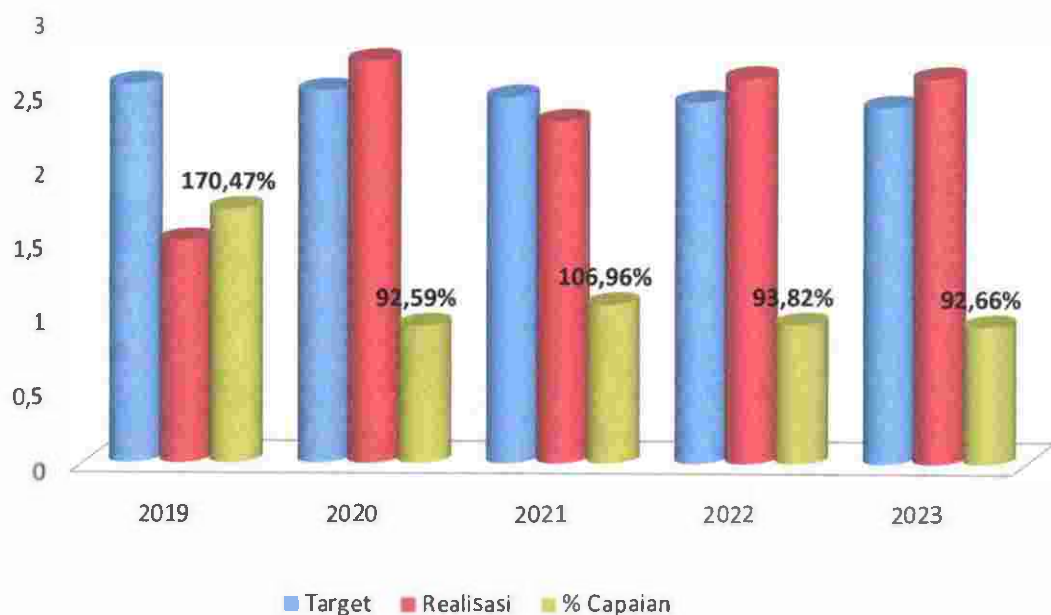
No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian tahun Ke				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	kontrasepsi jangka panjang (MKJP)																		
7.	Menurunnya tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi (Drop Out/DO)	-	-	-	-	-	2,5%	15,5%	10,5%	-	-	20,50%	67,80%	13,48%	-	-	0,1	0,23	1,28
8.	Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan	-	-	-	-	21	21	25	24	-	29	28	26	27	-	0,72	0,75	0,96	0,89

Dari tabel pencapaian kinerja pelayanan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)

Angka Kelahiran Total (TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (15-49 tahun). Untuk Tahun 2022 angka kelahiran total di Kabupaten Ende sebesar 2,59 belum memenuhi target daerah yang ditetapkan. Perkembangan pencapaian angka kelahiran total mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir (1,4 di tahun 2019 naik di tahun 2020, dan kembali turun di tahun 2021). Untuk tahun 2023 angka kelahiran total belum bisa diukur dan diprediksi capaiannya sama dengan tahun 2022. Target Nasional untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2023 adalah 2,36. Angka kelahiran total untuk Kabupaten Ende belum mencapai target daerah maupun nasional yang ditetapkan.

Gambar 2.1 Perbandingan Tren Pencapaian TFR Periode Tahun 2019-2023

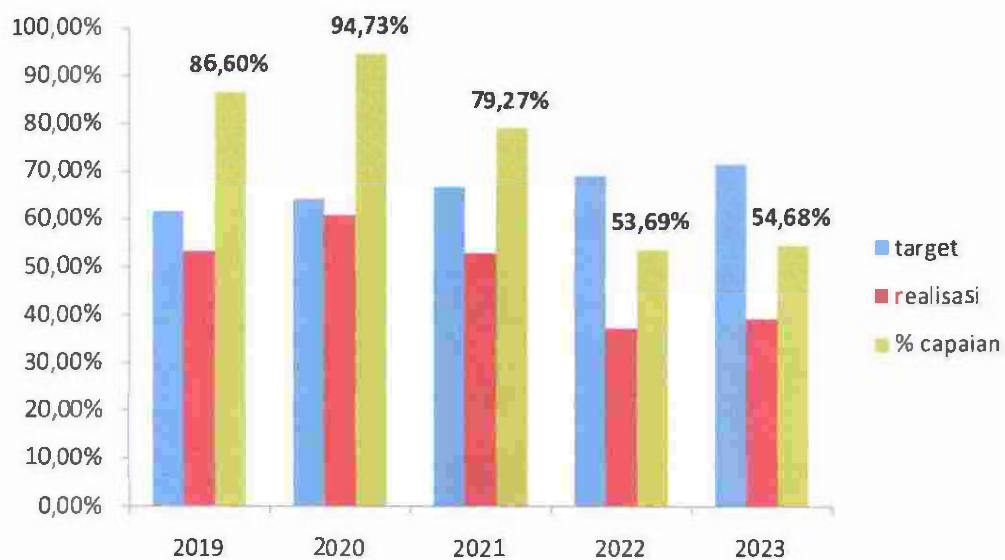


b. Persentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR)

Persentase pemakaian kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/ CPR) adalah perbandingan antara jumlah wanita usia kawin 15-49 tahun (Pasangan Usia Subur/ PUS) yang sedang menggunakan kontrasepsi

modern dibandingkan dengan jumlah seluruh PUS. Metode kontrasepsi modern meliputi metode operasi wanita (MOW)/ steril wanita, metode operasi pria (MOP)/ steril pria, IUD/ spiral/ Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR), implant/ susuk, suntik, pil, kondom. Perkembangan pemakaian kontrasepsi di Kabupaten Ende mengalami penurunan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Target Nasional untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur CPR diharapkan sebesar 57,14%, sedangkan target kabupaten sebesar 71,71%, masih sangat jauh dari capaian tahun 2023 sebesar 39,21%. Tantangan dalam upaya pencapaiannya antara lain masih adanya mitos atau rumor negatif pada masyarakat terkait penggunaan kontrasepsi, belum semua tenaga kesehatan (dokter dan bidan) mendapatkan pelatihan CTU IUD/ Implant dan memiliki sertifikat kompetensi, belum idealnya rasio tenaga PKB dengan jumlah desa saat ini (1:8 desa) dengan kondisi ideal (1:2 desa) sehingga pelaksanaan komunikasi, edukasi dan informasi (KIE) kurang optimal.

Gambar 2.2 Perbandingan Tren Pencapaian CPR Periode Tahun 2019-2023

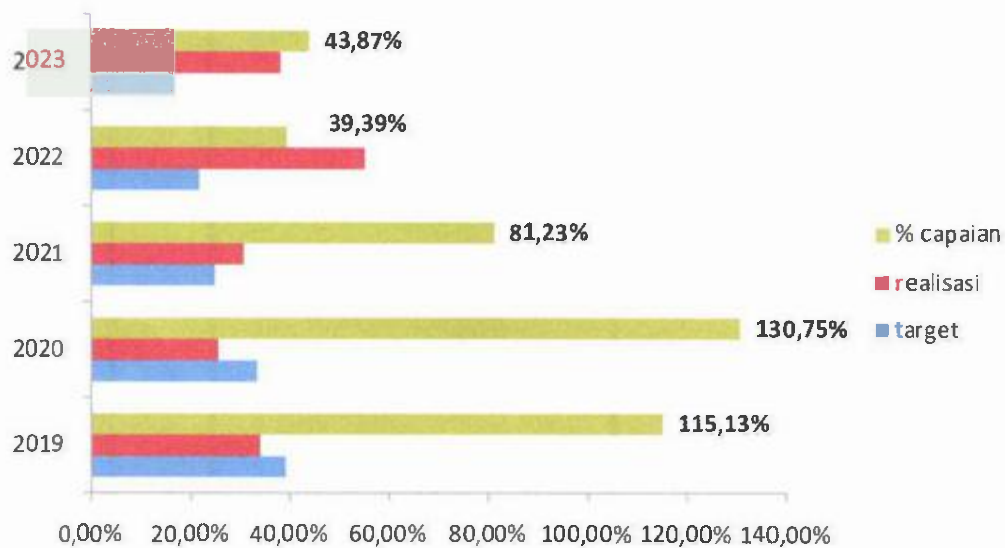


c. Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)

Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet need) adalah persentase wanita kawin 15-49 tahun (pasangan usia subur) yang tidak ingin mempunyai anak (lagi) atau ingin menjarangkan

kelahiran berikutnya tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi apapun. Selama kurun waktu lima tahun, unmeet need mengalami fluktuasi, pada tahun 2019 posisi unmeet need sebesar 33,98% turun pada tahun 2020 menjadi 25,50% meningkat kembali pada tahun 2021 sebesar 30,68% dan kembali naik di tahun 2022 sebesar 55,12%, dan turun kembali pada tahun 2023 menjadi 38,09%. Perkembangan pencapaian indikator ini sampai dengan akhir periode RPJMD masih sangat jauh dari target yang ditetapkan sebesar 16,72% demikian juga dengan target Nasional sebesar 13,21%. Faktor kegagalan/ penghambat pencapaian ini antara lain : hambatan spesifik dalam penggunaan kontrasepsi yaitu masih terdapat masyarakat yang belum terinformasi tentang metode KB dan terdapat muatan isi pesan yang kurang tepat sasaran, hambatan akses masyarakat untuk ke fasilitas pelayanan kesehatan dan masih belum optimalnya pemberian informasi kepada masyarakat tentang fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan KB

Gambar 2.3 Perbandingan Tren Pencapaian Unmeet Need Periode 2019 - 2023



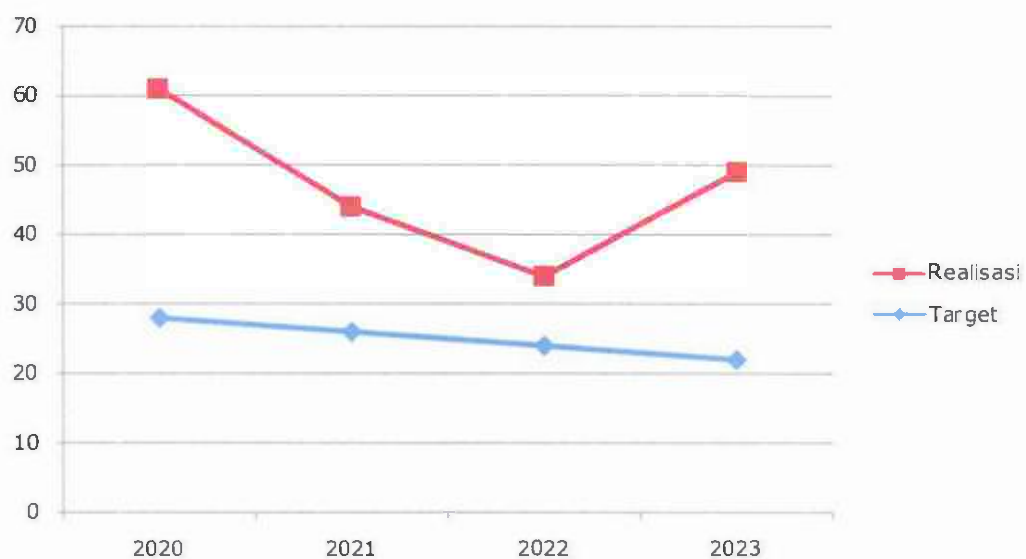
d. Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur (ASFR 15-19 Thn)

Angka ini dapat digunakan untuk memetakan fertilitas umur muda yang dapat menjadi peringatan dini terhadap ancaman tingginya fertilitas secara umum. Fertilitas pada usia muda akan mempengaruhi potensi melahirkan sampai dengan masa reproduksinya berakhir. Jika di usia

muda (masa reproduksi awal) perempuan sudah hamil dan melahirkan berarti akan memiliki potensi untuk hamil dan melahirkan anak lebih banyak lagi sampai dengan akhir usia reproduksinya. Oleh karena itu, menurunkan fertilitas remaja (ASFR 15–19 tahun) akan memberikan kontribusi terhadap penurunan angka fertilitas secara umum (TFR).

Selama kurun waktu empat tahun, ASFR mengalami fluktuasi dari 33 per 1000 kelahiran pada tahun 2020, turun menjadi 18 per 1000 kelahiran pada tahun 2021, turun lagi menjadi 10 per 1000 kelahiran pada tahun 2022 dan kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 27 per 1000 kelahiran. Perkembangan pencapaian indikator ini sampai dengan akhir periode RPJMD masih jauh dari target yang ditetapkan sebesar 20 per 1000 kelahiran, demikian juga dengan target Nasional sebesar 10 per 1000 kelahiran. Tantangan dalam upaya pencapaian ASFR 15 – 19 tahun antara lain belum optimalnya sinergitas implementasi antar program dan kegiatan tentang remaja, belum optimalnya koordinasi di lini lapangan terkait dengan pembinaan ketahanan remaja terutama remaja putus sekolah, belum optimalnya sentuhan program edukasi kesehatan reproduksi.

Gambar 2.4 Perbandingan Tren Pencapaian Unmeet Need Periode 2020 – 2023



- e. Meningkatnya implementasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan pengendalian penduduk

Implementasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan pengendalian penduduk mulai diukur padatahun 2022 karena indikator ini ditetapkan pada Perubahan Rencana Strategis 2019- 2024. Pencapaiannya mengalami peningkatan dari 50% pada tahun 2022 menjadi 56,25% pada tahun 2023.

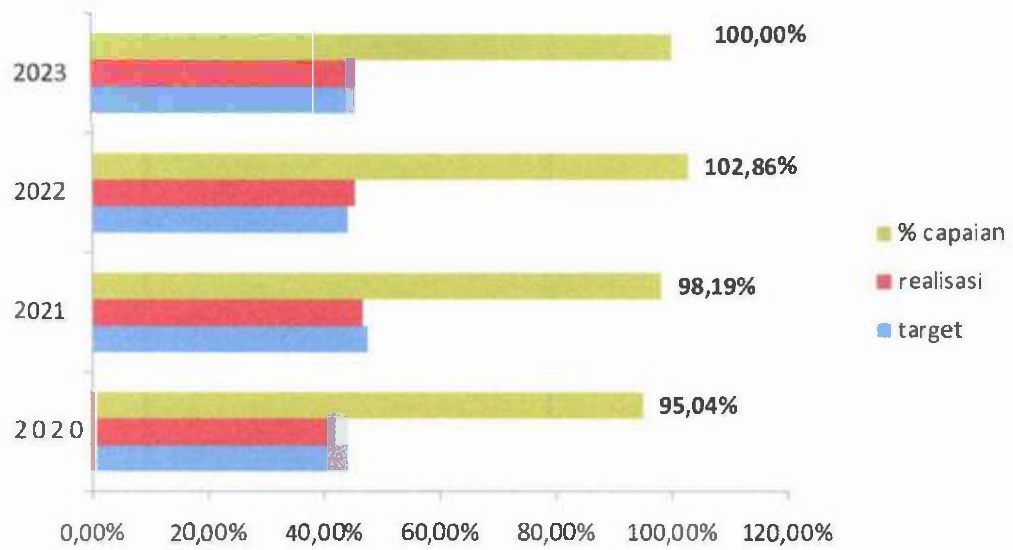
Gambar 2.5 Perbandingan Tren Pencapaian Implementasi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Pengendalian Penduduk Periode Tahun 2022-2023



- f. Meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)  
Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) adalah perbandingan antara pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta kb aktif metode kontrasepsi jangka panjang dengan total pasangan usia subur.

Selama kurun waktu empat tahun pencapaian MKJP mengalami fluktuasi 41,75% pada tahun 2020, meningkat menjadi 46,64% pada tahun 2021 dan kembali menurun pada tahun 2022 dan 2023. Perkembangan pencapaian indikator ini sampai dengan akhir periode RPJMD hampir mencapai dari target yang ditetapkan sebesar 46,51%.

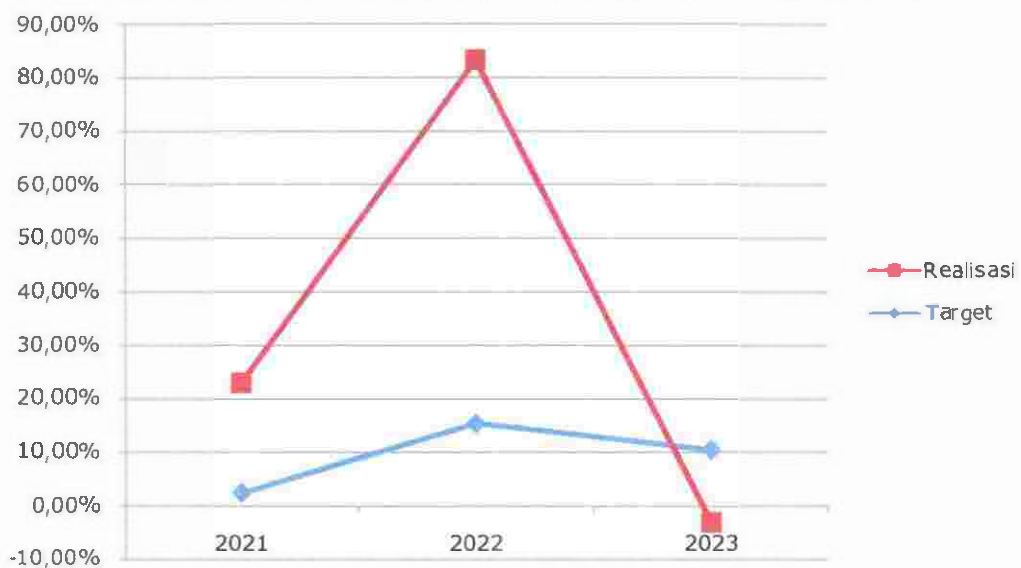
Gambar 2.6 Perbandingan Tren Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Periode Tahun 2020-2023



g. Menurunnya tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi (Drop Out/ DO)

Persentasi tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi merupakan persentasi PUS yang mengalami putus pakai kontrasepsi dibandingkan dengan jumlah PUS yang ada. Pencapaiannya selama tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi, 20,50% pada tahun 2021, meningkat menjadi 67,80% pada tahun 2022 dan menurun menjadi - 13,48% pada tahun 2023.

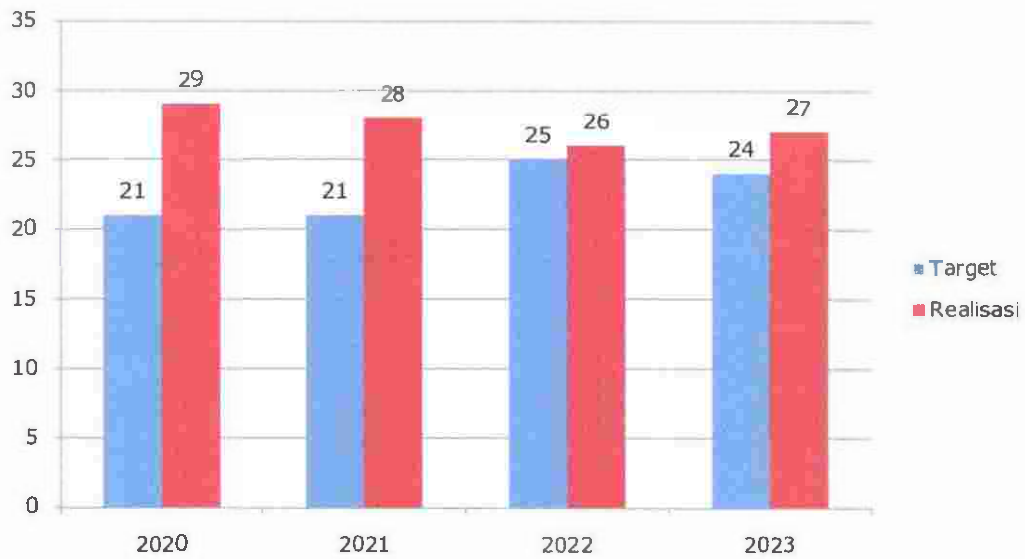
Gambar 2.7 Perbandingan Tren Pencapaian Menurunnya tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi (Drop Out/ DO) Periode 2021 - 2023



h. Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan

Pencapaian rata-rata usia kawin pertama perempuan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir juga mengalami fluktuasi, menurun dari tahun 2020 ke tahun 2022 kembali meningkat di tahun 2023, selengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 2.8 Perbandingan Tren Pencapaian Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan Periode 2020 – 2023



Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke			Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Belanja Operasi	10.440.170.658	9.945.736.889	12.373.614.157	9.372.506.962	8.267.879.449	9.016.600.102	0,89	0,83	0,72
Belanja Pegawai	2.617.470.782	2.632.842.889	2.369.839.157	2.498.176.400	2.498.738.280	2.290.673.048	0,95	0,94	0,96
Belanja Barang Jasa	7.777.708.876	7.292.494.000	9.929.375.000	6.871.630.562	5.767.686.169	6.722.927.054	0,88	0,79	0,67
Belanja Bantuan Sosial	45.000.000	20.400.000	74.400.000	2.700.000	1.450.000	3.000.000	0,06	0,07	0,04
Belanja Modal	1.073.850.546	1.110.235.000	1.146.660.000	1.051.755.000	1.067.968.200	1.131.829.000	0,97	0,96	0,98
<b>Total</b>	<b>11.514.030.204</b>	<b>11.055.971.889</b>	<b>13.520.274.157</b>	<b>10.424.261.962</b>	<b>9.335.842.649</b>	<b>10.148.429.102</b>	<b>0,90</b>	<b>0,84</b>	<b>0,75</b>

Dari Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan digambarkan bahwa rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun 2021 – 2023 mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Rasio Tahun 2021 : 0,90 turun di tahun 2022 menjadi 0,84 dan kembali turun di tahun 2023 menjadi 0,75. Beberapa permasalahan yang menjadi penyebab terus menurunnya rasio tersebut antara lain : ketidakpatuhan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah dibuat, kurangnya sumber daya manusia pengelola kegiatan dibidang teknis, kurangnya etos kerja pelaksana kegiatan baik di lapangan maupun di bidang teknis.

#### 2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam: a. menetapkan pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga di kabupaten/kota; dan b. sosialisasi, advokasi, dan koordinasi pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakat setempat, dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar wajib dilaksanakan daerah.

Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Ende sebagai pelaksana program kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan berupa : pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk; pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk; pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana; pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana dan petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana; pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi; pelaksanaan pelayanan keluarga berencana; pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan pembinaan kesetaraan keluarga berencana, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Pelayanan yang diberikan difokuskan kepada masyarakat, dan dalam memberikan pelayanan tersebut Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Ende didukung oleh perangkat daerah, mitra perangkat daerah dan organisasi masyarakat antara lain :

1. Dinas Kesehatan
2. Puskesmas
3. Kepala Desa
4. Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD
5. Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK)
6. IBI
7. Organisasi/ LSM lainnya.

### **3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Pada umumnya permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana) adalah :

1. Angka kelahiran total masih perlu diturunkan agar tercapai pertumbuhan penduduk seimbang.
2. Belum optimalnya sinergitas pelaksanaan pengendalian penduduk dan pemanfaatan data informasi kependudukan.
3. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang isu-isu kependudukan sehingga diperlukan upaya yang masif dan terstruktur untuk KIE/promosi Program Bangga Kencana.
4. Rendahnya angka pemakaian kontrasepsi (CPR).
5. Tingginya angka unmeet need.
6. Tingginya Peserta KB yang putus pakai (Drop Out) disertai masih rendahnya kesertaan KB Pria.
7. Belum optimalnya cakupan dan kualitas pelayanan KB Pasca Persalinan (KB-PP).
8. Belum optimalnya pengetahuan orang tua tentang cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
9. Kurangnya pemahaman remaja dan keluarga tentang perencanaan/penyiapan kehidupan berkeluarga.
10. Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan keluarga.
11. Belum maksimalnya strategi advokasi dan pengelolaan promosi/KIE melalui berbagai jenis media dalam meningkatkan pemahaman serta perubahan sikap dan perilaku dalam mendukung program Bangga Kencana.
12. Perlunya peningkatan kualitas data basis program Bangga Kencana.
13. Kompetensi ASN Dinas PPKB dalam aspek manajerial belum sepenuhnya mampu menghadapi perubahan lingkungan strategis.

### **3.2. Isu Strategis**

Berbagai isu strategis yang berkembang saat ini dan perlu mendapat perhatian dalam merumuskan arah kebijakan, strategi serta kebijaksanaan program/kegiatan pada Rencana Strategis Dinas PPPKB Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026 antara lain :

1. Isu strategis terkait pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan :
  - a. Bonus demografi, salah satu faktor penentu terciptanya struktur penduduk yang diinginkan adalah pengendalian angka kelahiran total/total fertility rate (TFR). Dalam jangka waktu yang relatif panjang, angka kelahiran ini menjadi salah satu penentu struktur penduduk. Struktur penduduk seperti ini harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik. Salah satunya adalah dengan tetap menjaga TFR pada level tertentu.
  - b. Pendekatan siklus hidup berbasis perencanaan hidup berkeluarga, dimulai dari gagasan perencanaan dari tahap pra berkeluarga (perencanaan kehidupan berkeluarga), merencanakan keinginan untuk memiliki anak termasuk jumlah anak yang dikehendaki, proses kehamilan yang merupakan fase yang juga penting dalam proses tumbuh kembang anak, 1.000 Hari Pertama Kehidupan (periode yang dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun), pendidikan anak usia dini (pra sekolah) sampai dengan usia sekolah, remaja dengan berbagai pendekatannya dalam penyiapan generasi bangsa yang berkualitas menuju usia produktif/bekerja serta perhatian terhadap kelanjutusiaan (seluruh tahapan kehidupan).
2. Isu strategis terkait pemenuhan layanan dasar :
  - a. Penggunaan kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) yang masih rendah, diperkirakan 2 (dua) penyebab utama menurunnya jumlah pengguna kontrasepsi modern, khususnya di kalangan kelompok usia produktif/pasangan usia muda adalah masih rendahnya pengetahuan pasangan muda terhadap kesehatan reproduksi dan kurangnya akses terhadap informasi yang akurat dan terpercaya mengenai alat kontrasepsi (khususnya alat kontrasepsi modern).
  - b. Rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga; dengan informasi yang benar, diharapkan remaja memiliki sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi. Kurangnya sosialisasi dan edukasi kesehatan reproduksi dapat memicu terjadinya hal-hal yang tak diinginkan, diantaranya terkait penyakit seksual menular, kehamilan di usia muda, hingga aborsi yang dapat mengakibatkan morbiditas bahkan mortalitas ibu. Angka kelahiran umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) juga masih relative tinggi, meskipun

penurunnya cukup signifikan dari tahun ketahun. Kendala yang masih ada yaitu rendahnya pemahaman remaja dan calon pengantin terkait kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga. Pemberian informasi yang disesuaikan dengan usia dan kesiapan anak/remaja dapat meningkatkan pemahaman mereka atas sistem, proses, fungsi alat reproduksi dan cara menjaga kesehatan reproduksinya, serta meningkatkan pemahaman atas konsep perencanaan kehidupan berkeluarga.

- c. Kebutuhan ber-KB Pasangan Usia Subur yang belum terlayani (unmet need) dikategorikan masih tinggi.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan dan Sasaran

#### *Tujuan*

Tercapainya Penduduk Tumbuh Seimbang, dengan indikator kinerjanya : Angka kelahiran total (Total Fertility Rate /TFR) per WUS usia 15-49 Tahun.

#### *Sasaran*

1. Meningkatnya Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate /mCPR).
2. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need).
3. Mewujudkan Keluarga yang Mandiri, Tentram dan Bahagia (Keluarga Berkualitas).
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja.

Tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026 beserta indikator kinerjanya selengkapnya disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

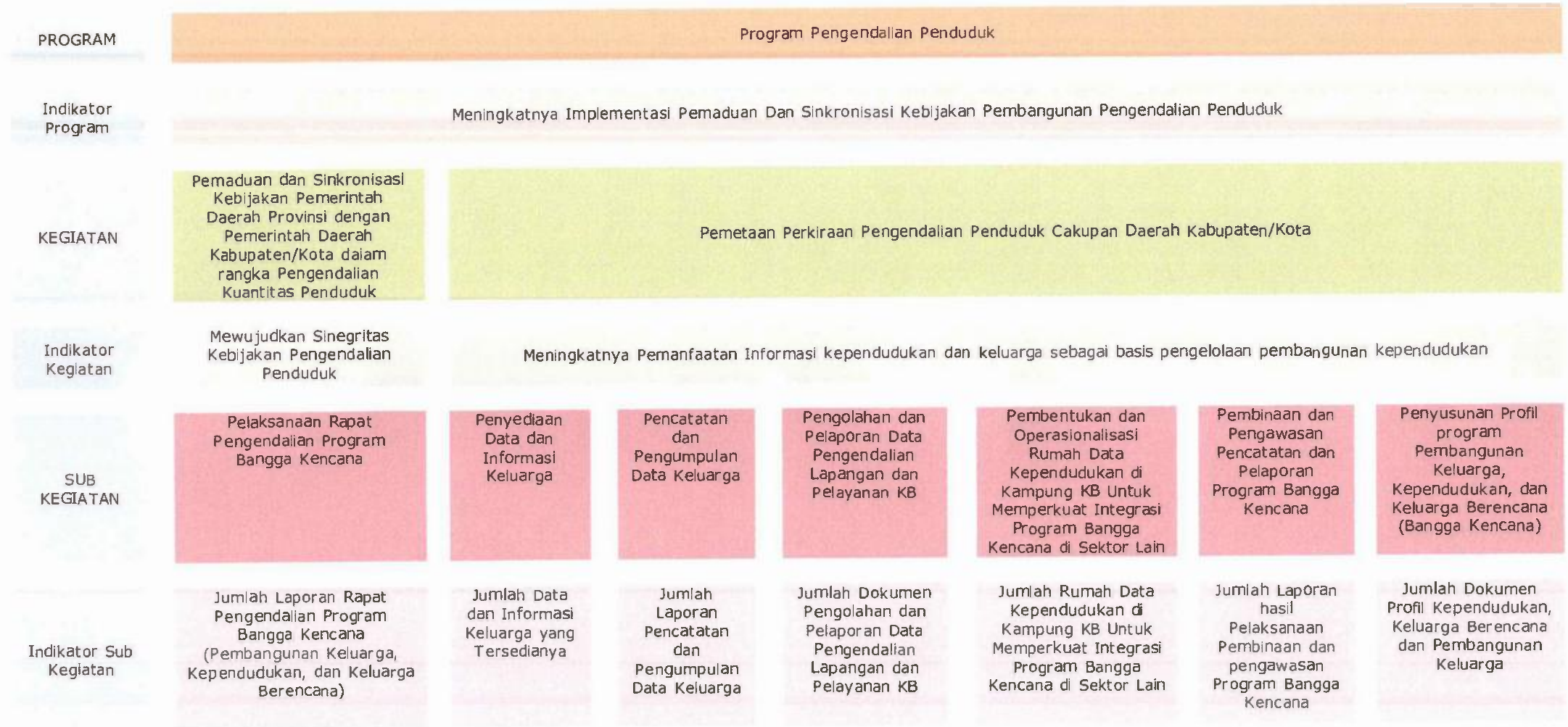
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaranpa da Tahun Ke	
				2025	2026
1.	Tercapainya Penduduk Tumbuh Seimbang			2,35	2,3
2.		Meningkatnya Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate /mCPR).	Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate /mCPR)	55%	60%
3.		Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need).	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need )	16%	15,5%
4.		Mewujudkan Keluarga yang Mandiri, Tentram dan Bahagia (Keluarga Berkualitas).	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	59,20	60,20
5.		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja.	Nilai SAKIP	B	B

### 4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Gambar 4.1. Cascading Kinerja Tujuan – Sasaran - Program

TUJUAN	Terciptanya Penduduk Tumbuh Seimbang			
Indikator Tujuan	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate /TFR) per WUS usia 15-49 Tahun			
SASARAN	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate /mCPR)	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	Mewujudkan Keluarga yang Mandiri, Tenram dan Bahagia (Keluarga Berkualitas)
Indikator Sasaran	Nilai SAKIP	Angka prevaiensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate /mCPR)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Pengendalian Penduduk	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Indikator Program	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Implementasi Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Pengendalian Penduduk	Meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)  Menurunnya tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi (Drop Out/ DO)	Menurunnya Agka Kelahiran Pada Remaja Usia 15-19 Thn (ASFR 15-19 Thn)  Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Meiakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga  Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan
Unit Kerja Penanggung Jawab	Sekretariat	Bidang Pengendalian Penduduk	Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, Bidang Keluarga Berencana	Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Gambar 4.2. Cascading Kinerja Program - Kegiatan – Sub Kegiatan



PROGRAM	Program Keluarga Berencana									
Indikator Program	Menurunnya tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi (Drop Out/ DO)									
KEGIATAN	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal					Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/ PLKB)				
Indikator Kegiatan	Presentase Stakeholder yang mendukung Program Bangsa Kencana			Persentase masyarakat yang terjangkau Program Bangsa Kencana			Cakupan PKB/ PLKB yang Didayagunakan untuk Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Dalduk			
SUB KEGIATAN	Pengendalian Program KKBP	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Advokasi Program Bangsa Kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Penyediaan Sarana Pendukung Operasioal PKB/ PLKB	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Facilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/ PLKB)
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBP	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/ PLKB yang Tersedia	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/ PLKB)

PROGRAM	Program Keluarga Berencana										
Indikator Program	Meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)										
KEGIATAN	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota								Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		
Indikator Kegiatan	Cakupan Ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat				Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP						Meningkatnya peran serta Organisasi Masyarakat dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber -KB
SUB KEGIATAN	Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alkon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Orang Yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alkon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Tenaga Pelayanan Yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Akseptor Yang Mendapat Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Pengelola dan Petugas Yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas Yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	

PROGRAM	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera										
Indikator Program	Cakupan Kelompok Kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga				Menurunnya Angka Kelahiran Pada Remaja Usia 15 - 19 Thn (ASFR 15-19 Thn)				Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan		
KEGIATAN	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)		
Indikator Kegiatan	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB		Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber KB		Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber KB	Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/ Mahasiswa
SUB KEGIATAN	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Berkeluarga) Bagi Remaja	Penyediaan Sarana edukasi PKBR di kelompok kegiatan
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Jumlah Kelompok Kegiatan Remaja yang Mendapatkan Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Berkeluarga) Bagi Remaja	Jumlah unit Sarana edukasi PKBR di kelompok kegiatan

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende dua 2 (dua) tahun ke depan, sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2025 – 2026, selengkapnya dilihat dalam tabel 5.1 dibawah ini :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terciptanya Penduduk Tumbuh Seimbang	Meningkatnya Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate /mCPR)	Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan kapasitas faskes dan jaringan/jejaring yang melayani KB</li> <li>2. Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dan peningkatan pelayanan KB Pasca Persalinan (KB PP)</li> <li>3. Penguatan kapasitas tenaga medis pelayanan KB (dokter, bidan) serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KB.</li> </ol>
		Menguatnya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan sinergitas kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk</li> <li>2. Peningkatan sinkronisasi dan pemanfaatan data/informasi kependudukan</li> </ol>
	Menurunnya kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	Meningkatkan Advokasi dan Penggerakan Program Bangsa Kencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan penyebaran materi KIE Program Bangsa Kencana</li> <li>2. Peningkatan kinerja tenaga Penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader PPKBD/Sub PPKBD</li> </ol>
	Mewujudkan Keluarga yang Mandiri, Tenram dan Bahagia (Keluarga Berkualitas )	Meningkatkan ketahanan dan Kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan pemahaman 8 fungsi keluarga.</li> <li>2. Optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita dan anak, serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga.</li> <li>3. Peningkatan pola asuh dan</li> </ol>

			<p>pendampingan remaja, peningkatan kualitas dan karakter remaja, serta penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Peningkatan kemandirian ekonomi keluarga, dengan sasaran khusus keluarga-keluarga akseptor.</li> <li>5. Penguatan pelayanan ramah lansia melalui 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh.</li> <li>6. Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga</li> </ol>
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan BMN</li> <li>2. Penguatan Perencanaan Program dan Anggaran</li> <li>3. Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur</li> <li>4. Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan yang berkualitas</li> </ol>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan arah kebijakan, maka langkah operasioanalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende Tahun 2025– 2026 dapat dilihat pada tabel 6.1 dibawah ini :

Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awai Perencanaan (2023)	Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp			
Terciptanya Penduduk Tumbuh Seimbang				Angka kelahiran total (Total Fertility Rate /TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,82	2,35		2,3	2,3			
	Meningkatnya Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate /mCPR)			Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate /mCPR)	39,21%	55%		60%	60%			
		2.14.02.2	Program Pengendalian Penduduk	Meningkatnya Implementasi Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Pengendalian Penduduk	56,25 %	87 %	900.000.000	88 %	950.000.000	88 %		
		2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Mewujudkan Sinegritas Kebijakan Pengendalian Penduduk	100 %	100 %	180.000.000	100 %	180.000.000	100 %		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan (2023)	Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp			
		2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	2 Laporan	1 Laporan	170.000.000	1 Laporan	180.000.000	2 Laporan	Dinas PPKB	
		2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemanfaatan Informasi kependudukan dan keluarga sebagai basis pengelolaan pembangunan kependudukan	100 %	100 %	720.000.000	100,00 %	770.000.000	100,00 %		
		2.14.02.2.02.011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	8 Dok	8 Dok	40.000.000	8 Dok	45.000.000	16 Dok	Dinas PPKB	
		2.14.02.2.02.012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	260.000.000	2 Laporan	Dinas PPKB	
		2.14.02.2.02.013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	12 Dokumen	190.000.000	12 Dokumen	195.000.000	24 Dokumen	Dinas PPKB	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awai Perencanaan (2023)	Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp			
		2.14.02.2.02.015	Pembentukan dan Operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	1 Unit	27 Unit	115.000.000	36 Unit	130.000.000	36 RDK	Dinas PPKB	
		2.14.02.2.02.018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	1 Laporan	1Laporan	50.000.000	1 Laporan	55.000.000	2 Laporan	Dinas PPKB	
		2.14.02.2.02.020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	85.000.000	2 Dokumen	Dinas PPKB	
	<b>Menurunnya Kebutuhan BerKB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)</b>			<b>Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need )</b>	<b>38,09%</b>	<b>16%</b>		<b>15,5%</b>		<b>15,5%</b>		
		2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	45,31 %	47,72 %	4.800.000.000	48,74 %	4.850.000.000	48,74 %		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awai Perencanaan (2023)	Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Target	Rp	Target	Rp				Target
				Menurunnya tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi (Drop Out/DO)	-13,48%	12,00%	1.550.000.000	11,00%	1.600.000.000	11,00%			
		2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Presentase Stakeholder yang mendukung Program Bangga Kencana	85 %	86,0 %	862.000.000	86,5 %	1.012.000.000	86,5 %			
				Persentase masyarakat yang terjangkau Program Bangga Kencana	68 %	76%	140.000.000	77 %	140.000.000	77%			
		2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 Laporan	2Laporan	80.000.000	2 Laporan	80.000.000	4 Laporan	Dinas PPKB		
		2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana)	21 Laporan	21 Laporan	500.000.000	21 Laporan	550.000.000	42 Laporan	Dinas PPKB		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awai Perencanaan (2023)	Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target		
		2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya	114 Laporan	210 Laporan	162.000.000	210 Laporan	250.000.000	420 Laporan	Dinas PPKB	
		2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100 Dok	200 Dok	50.000.000	210 Dok	50.000.000	410 Dok	Dinas PPKB	
		2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	3 Dok	3 Dok	10.000.000	3 Dok	10.000.000	6 Dok	Dinas PPKB	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awai Perencanaan (2023)	Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp			
										Target		
		2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	27 Organisasi	35 Organisasi	200.000.000	40 Organisasi	212.000.000	40 Organisasi	Dinas PPKB	
		2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan PKB / PLKB yang didayagunakan untuk perencanaan pelaksanaan Pembangunan Daerah di bidang dalduk	45,45 %	61 %	548.000.000	62 %	448.000.000	62 %		
		2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasioal PKB/ PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/ PLKB yang Tersedia	39 Unit	2 Unit	60.000.000	2 Unit	60.000.000	4 Unit	Dinas PPKB	
		2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	834 Kader	834 Kader	378.000.000	834 Kader	278.000.000	834 Kader	Dinas PPKB	
		2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	278	278	100.000.000	278	100.000.000	278	Dinas PPKB	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan (2023)	Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp			
										Target		
		2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana (PKB/ PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana (PKB/ PLKB)	21 Laporan	21 Laporan	10.000.000	21 Laporan	10.000.000	42 Laporan	Dinas PPKB	
		2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	43,59 %	50 %	1.970.000.000	55 %	1.970.000.000	55 %		
				Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100 %	100 %	2.105.000.000	100 %	2.155.000.000	100 %		
		2.14.03.2.03.0001	Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	42 Laporan	Dinas PPKB	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awai Perencanaan (2023)	Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp			
										Target		
		2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang Yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1646 Orang	3200 Orang	1.800.000.000	3200 Orang	1.800.000.000	4400 Orang	Dinas PPKB	
		2.14.03.2.03.0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alkon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alkon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	Dinas PPKB	
		2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	43 Unit	40 Unit	1.665.000.000	40 Unit	1.715.000.000	80 Unit	Dinas PPKB	
		2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	2 Laporan	Dinas PPKB	
		2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan Yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi		15 Orang	200.000.000	15 Orang	200.000.000	30 Orang	Dinas PPKB	
		2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor Yang Mendapat Peningkatan Kesertaan KB Pria		5 Orang	20.000.000	5 Orang	20.000.000	10 Orang	Dinas PPKB	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awai Perencanaan (2023)	Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp			
								2.14.03.2.03.0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pengelola dan Petugas Yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB		
		2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Meningkatnya peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber -KB	8 %	50 %	725.000.000	60%	725.000.000	60%		
		2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dok	1 Dok	25.000.000	1 Dok	25.000.000	2 Dok	Dinas PPKB	
		2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas Yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	54	54	700.000.000	54	700.000.000	54	Dinas PPKB	
		<b>Mewujudkan Keluarga yang Mandiri, Tentram dan Bahagia (Keluarga Berkualitas)</b>		<b>Indeks Pembangunan Keluarga (i Bangga)</b>		<b>59,20%</b>		<b>60,20%</b>		<b>60,20%</b>		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan (2023)	Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp			
										Target		
		2.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan Kelompok Kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga		50,00 %	1.550.000.000	60,00 %	1.580.000.000	60,00 %		
				Menurunnya Angka Kelahiran Pada Remaja Usia 15-19 Thn (ASFR 15-19 Thn)		10 per 1000 Kelahiran		10 per 1000 Kelahiran		10 per 1000 Kelahiran		
				Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan		25 Tahun		24 Tahun		24 Tahun		
		2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB		23 %	30.000.000	30%	30.000.000	37%		
				Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber KB		21 %	320.000.000	28 %	320.000.000	28 %		
				Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber KB		15 %	25.000.000	24 %	25.000.000	33 %		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan (2023)						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target		
		2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	2 Laporan	Dinas PPKB	
		2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)		1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	2 Laporan	Dinas PPKB	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan (2023)						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target		
		2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	2 Laporan	Dinas PPKB	
		2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia		20 Unit	300.000.000	20 Unit	300.000.000	40 Unit	Dinas PPKB	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awai Perencanaan (2023)	Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp			
								2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan		
		2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	40 %	50 %	1.175.000.000	55 %	1.205.000.000	55 %		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan (2023)						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target		
		2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan perasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	2 Laporan	Dinas PPKB	
		2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja		1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	2 Laporan	Dinas PPKB	
		2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/kelahiran, Baduta/Balita)	4090	9216	525.000.000	11779	555.000.000	20995	Dinas PPKB	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awai Perencanaan (2023)	Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp			
		2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	4090	9216	600.000.000	11779	600.000.000	20995	Dinas PPKB	
	<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>Nilai SAKIP</b>		<b>B</b>		<b>B</b>		<b>B</b>		
		2.14.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien	100 %	100 %	4.399.831.951	100 %	4.435.931.360	100 %		
		2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	288.000.000	100 %	340.000.000	100 %		
		2.14.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	2 Dok	203.000.000	2 Dok	255.000.000	4 Dok	Dinas PPKB	
		2.14.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000	2 Dok	Dinas PPKB	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan (2023)						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target		
		2.14.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000	2 Dok	Dinas PPKB	
		2.14.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1Laporan	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	2 Laporan	Dinas PPKB	
		2.14.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	60.000.000	2 Laporan	Dinas PPKB	
		2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	3.030.831.951	100 %	3.031.931.360	100 %		
		2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang	30 Orang	3.000.831.951	30 Orang	3.001.931.360	30 Orang	Dinas PPKB	
		2.14.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dok	12 Dok	10.000.000	12 Dok	10.000.000	24 Dok	Dinas PPKB	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan (2023)	Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp			
										Target		
		2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	2 Laporan	Dinas PPKB	
		2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	10.000.000	18 Laporan	10.000.000	36 Laporan	Dinas PPKB	
		X.XX.01.2.03	Adminlstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Pelaksanaan Adminsitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	99.000.000	100 %	99.000.000	100 %		
		2.14.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	1 Dok	10.000.000	1 Dok	10.000.000	1 Dok	Dinas PPKB	
		2.14.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	1 Dok	24.000.000	1 Dok	24.000.000	2 Dok	Dinas PPKB	
		2.14.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	2 Laporan	Dinas PPKB	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan (2023)	Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp			
		2.14.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1Laporan	1Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	2 Laporan	Dinas PPKB	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	315.000.000	100 %	265.000.000	100 %		
		2.14.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	50.000.000			1 Paket	Dinas PPKB	
		2.14.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dok	1 Dok	15.000.000	1 Dok	15.000.000	3 Dok	Dinas PPKB	
		2.14.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		5 Orang	90.000.000	5 Orang	90.000.000	10 Orang	Dinas PPKB	
		2.14.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		5 Orang	160.000.000	5 Orang	160.000.000	5 Orang	Dinas PPKB	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	125.000.000	100 %	150.000.000	100 %		
		2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50.000.000	1 Paket	60.000.000	2 Paket	Dinas PPKB	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan (2023)	Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp			
		2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.000.000	1 Paket	20.000.000	2 Paket	Dinas PPKB	
		2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 Paket	60.000.000	1 Paket	70.000.000	2 Paket	Dinas PPKB	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pengadaan Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	240.000.000	100 %	220.000.000	100 %		
		2.14.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		4 Unit	90.000.000	5 Unit	120.000.000	9 Unit	Dinas PPKB	
		2.14.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 Paket	150.000.000	1 Paket	100.000.000	2 Paket	Dinas PPKB	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	52.000.000	100 %	55.000.000	100 %		
		2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1Laporan	37.000.000	1 Laporan	40.000.000	2 Laporan	Dinas PPKB	
		2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	2 Laporan	Dinas PPKB	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	250.000.000	100 %	275.000.000	100 %		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan (2023)						Unit Kerja Perang at Daerah Pen anggung g Jawab	Lok asi
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangk at Daerah		
						Target	Rp	Targ et	Rp	Target		
		2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	9 Unit	100.000.000	14 Unit	100.000.000	14 Unit	Dinas PPKB	
		2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	150.000.000	2 Unit	175.000.000	2 Unit	Dinas PPKB	

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2026 disajikan dalam tabel 7.1

Tabel 7.1 Indikator Kinerja DPPKB Kabupaten Ende Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator Kinerja Strategis	Formula Indikator	Kinerja Awal RPD (2023)	Target Kinerja		
			2024	2025	2026
Menurunnya Angka Kelahiran (TFR)	$TFR = 5 \sum_i ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{B_i}{F_{mi}} \times K$ <p><math>B_i</math> = Jumlah kelahiran dari wanita kelompok umur i tahun  <math>F_{mi}</math> = Jumlah penduduk wanita pada pertengahan tahun dalam ke umur i.  <math>K</math> = Konstanta (=1000)</p>	2,82	2,4	2,35	2,3
Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate /CPR)	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif Modern}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100$	39,21%	50%	55%	60%
Persentase Kebutuhan Ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	$\frac{\text{Jumlah PUS yang ingin ber KB tetapi tidak terlayani}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100$	38,09%	16,71%	16%	15,5%
Indeks Pembangunan Keluarga	$\frac{\text{Indeks Ketentraman} + \text{Indeks Kemandirian} + \text{Indeks Kebahagiaan}}{3}$	-	58,20	59,20	60,20

## **BAB VIII PENUTUP**

Upaya penguatan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang tergambar pada kondisi pencapaian Program Bangga Kencana selama lima tahun terakhir (Renstra 2019-2024), dimana beberapa target/sasaran yang telah ditetapkan belum berhasil dicapai secara maksimal. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende harus lebih meningkatkan komitmen bersama, dan lebih membangun kerja sama lintas sektor dengan seluruh mitra kerja utama, untuk bekerja lebih keras dan bekerja lebih cerdas dalam upaya pencapaian target/sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra 2025-2026.

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026 ini berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026 menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode Renstra sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada dua tahun berikutnya.

Akhirnya, segala upaya dalam implementasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang disusun di dalam dokumen Renstra ini diharapkan mendapat dukungan sepenuhnya dari seluruh Unit Kerja di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende. Segala permasalahan yang ada di dalam implementasi Program Bangga Kencana ke depan merupakan tantangan bersama yang harus dihadapi melalui berbagai strategi yang telah disiapkan.

  
BUPATI ENDE  
AGUSTINUS G NGASU